

PEMBANGUNAN

PROVINSI ACEH: KEBUTUHAN SINERGITAS DAN PEMETAAN ANCAMAN¹

DEVELOPMENT OF ACEH PROVINCE: NEEDS OF SYNERGITY AND THREAT MAPPING

Heru Syah Putra², Said Fadhil, Edy Saputra

Email: heruaddaif@gmail.com

ABSTRACT

The development challenges in Aceh is increasing in a row of strategic environmental changes, including globalization which bring new challenges of Aceh development. Several social and macro economic indicators shows that frustrating numbers. Poverty is becoming the main problems of development. The Huge fiscal authority has not able to brought improvement which show low level development synergy. Mapping of development threat is becoming more significant for collecting preventive or curative proceeding. This purpose research for mapping the development threat in Aceh province. The result of this research shows that Aceh will deal with four threaten namely politic, economic, social, and information technology. Poverty obtains huge attention while the other side poverty in Aceh still on the high level than the capacity of Aceh fiscal. Number of unemployment is high enough it because of low investment. Furthermore, natural disaster also affects the quality of development and the increasing of drugs trafficking.

Keywords: *Development, Synergity, Threat, Decentralization*

ABSTRAK

Tantangan pembangunan di Aceh terus meningkat seiring perubahan lingkungan strategis, termasuk globalisasi yang membawa tantangan baru pembangunan Aceh. Beberapa indikator makro ekonomi dan sosial menunjukkan angka yang mengecewakan. Kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan. Kewenangan fiskal yang besar belum mampu membawa perbaikan yang menunjukkan rendahnya sinergitas pembangunan. Pemetaan ancaman pembangunan menjadi penting guna mengambil tindakan preventif maupun kuratif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan ancaman pembangunan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling tidak Aceh menghadapi empat ancaman yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi informasi. Kemiskinan mendapat sorotan terbesar mengingat kemiskinan sangat tinggi di Aceh jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal Aceh. Jumlah pengangguran juga cukup tinggi akibat rendahnya investasi. Selain itu, bencana alam juga mempengaruhi kualitas pembangunan, disamping peredaran narkoba yang semakin meningkat.

¹ Diterima pada 15 Oktober 2018 . Diterima revisi terakhir pada 2 November 2018

² Peneliti Ahli Muda pada PKP2A IV LAN

Kata kunci: Pembangunan, Sinergitas, Ancaman, Desentralisasi

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis akibat globalisasi telah mempengaruhi kondisi ketahanan bangsa Indonesia. Perubahan situasi politik, ekonomi, dan sosial internasional telah mengubah bentuk ancaman terhadap ketahanan dan pembangunan Indonesia. Dinamika globalisasi juga mempengaruhi pola dan bentuk ancaman sehingga menjadi semakin kompleks dan multidimensional, tidak hanya ancaman militer tetapi juga ancaman non militer, baik nyata maupun tidak nyata (Sutomo, 2016).

Ancaman non militer sangat erat kaitannya dengan strategi perang global yang cenderung tidak bersifat frontal dan tidak langsung yang dikenal dengan istilah *proxy war*. Senjata dalam *proxy war* tidak menggunakan senjata konvensional melainkan isu-isu yang tidak sadar menembus pertahanan sebuah bangsa. Berbagai isu dikemas secara rapi dan terstruktur untuk dapat menembus dan merusak kedaulatan sebuah negara seperti isu ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia (HAM). Isu-isu tersebut dikemas secara menarik dalam bentuk propoganda yang disebarakan melalui media cetak maupun elektronik.

Provinsi Aceh merupakan sebuah provinsi yang dapat menjadi pusat pembelajaran tentang pentingnya pembangunan ketahanan negara di daerah melalui pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Stephen Sherlock menyatakan bahwa tradisi yang khas dalam kehidupan sosial politik masyarakat Aceh merupakan pendorong konflik separatisme di Aceh (Bakrie, 2007).

Penelitian lain yaitu Lesley McCulloch memandang konflik Aceh sebagai permasalahan yang timbul akibat ketidakmampuan mengelola isu nasionalisme dan ekonomi di Aceh.

Sedikitnya Aceh telah mengalami tiga fase pembangunan yaitu fase konflik, fase bencana alam dan perdamaian, dan fase pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan Aceh berjalan sangat lambat bahkan menurun pada fase konflik (sebelum 2005) karena hilangnya kepercayaan investor terhadap keamanan Aceh. Fase kedua yaitu fase perdamaian dan rehabilitasi bencana tsunami 2004. Pada fase ini pembangunan Aceh mendapat sorotan dan pendampingan langsung dari multi donor baik dalam maupun luar negeri. Triliunan rupiah mengalir ke Aceh dalam upaya pembangunan pasca tsunami tahun 2004 dan perdamaian pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tahun 2005. Fase ketiga yaitu fase pembangunan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi serta transisi politik. Beberapa daerah dipimpin oleh mantan kombatan dan kursi legislatif dikuasai oleh partai lokal seperti Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA).

Peningkatan kewenangan pemerintah Aceh dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Aceh 11/2006 belum mampu membawa Aceh menuju kondisi yang menggembirakan. Beberapa indikator makro ekonomi dan sosial menunjukkan angka yang mengecewakan. Walaupun produk domestik regional bruto (PDRB) cenderung tumbuh setiap tahunnya, indikator kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi.

Kondisi kemiskinan di Aceh belum memuaskan meskipun persentase penduduk miskin cenderung turun selama periode 2012-2015. Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 848 ribu orang (16,73 persen). Selain itu, pengangguran juga cenderung meningkat yaitu dari 179,944 jiwa pada tahun 2012 menjadi 217.806 pada akhir tahun 2015 (Bappeda Aceh, 2016).

Permasalahan ekonomi dan sosial di atas dapat mendorong muncul dan meningkatnya potensi ancaman non militer di Aceh (Kemhan Aceh, 2017). Kesejahteraan yang belum meningkat secara nyata dapat mendorong kembali gerakan separatis akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap agenda pembangunan daerah. Kemiskinan yang masih dirasakan sebagian mantan kombatan GAM sangat berpotensi mendorong keinginan untuk berjuang kembali. Walaupun sudah ada beberapa program reintegrasi bagi eks kombatan seperti pemberian dana, program tersebut belum efektif mengangakat kesejahteraan mereka. Akibatnya sebagian besar mantan GAM diyakini masih dililit kemiskinan yang dapat mendorong tindakan kriminal (Haffan, 2015).

Ancaman pembangunan lainnya yang sangat mengganggu agenda pembangunan dan keamanan di Aceh adalah narkoba (Kemhan Aceh, 2017). Aceh tidak hanya menghadapi ancaman peningkatan pengguna narkoba tetapi juga telah menjadi wilayah transit dan produsen narkoba di Indonesia. Jenis narkoba yang beredar juga semakin variatif yaitu

tidak hanya ganja tetapi juga sabu-sabu. Walaupun beberapa tindakan pencegahan dan penanggulangan telah masif dilakukan, kasus narkoba di Aceh cenderung meningkat tajam. Semakin memburuknya kasus narkoba di Aceh mendorong pemerintah Aceh untuk memasukan agenda pencegahan dampak narkoba dalam RPJM Aceh 2012-2017 dengan agenda peningkatan sosialisasi hukum dan bahaya narkoba (RPJM Aceh, 2017).

Beberapa permasalahan pembangunan di atas menunjukkan masih lemahnya sinergitas pembangunan di Aceh. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mendorong tumbuhnya atau meningkatnya ancaman non militer di Aceh yang dapat mengancam pembangunan di Aceh. Rencana pembangunan Aceh dalam RPJM 2019-2022 harus berdasarkan pembangunan yang sinergis dengan melibatkan unsur utama dan unsur penunjang pembangunan sehingga visi misi Gubernur baru yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani dapat tercapai. Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan yang sinergi, maka dianggap perlu sebuah kajian yang dapat memetakan ancaman pembangunan di Aceh.

Masalah Penelitian

Relatif kurang sinerginya pembangunan di Aceh dikhawatirkan mendorong beberapa ancaman pembangunan. Oleh sebab itu,

pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk ancaman pembangunan di Provinsi Aceh?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah di Provinsi Aceh guna menghadapi ancaman ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Memetakan bentuk ancaman pembangunan di Provinsi Aceh.
- b. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah di Provinsi Aceh.

B. STUDI PUSTAKA

1. Sinergitas

Sinergitas merupakan proses menyelaraskan beberapa aktivitas dalam rangka memperoleh suatu hasil yang menjadi sasaran. Sinergitas merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Secara garis besar sinergitas akan tumbuh dari suatu hubungan yang berasal dari dua pihak atau lebih yang sering berkomunikasi dan membentuk kerjasama yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dari semua pihak dan komunikasi antara dua atau lebih lembaga yang besar dalam mempengaruhi hasil akhir dari kerjasama antara lembaga dengan hasil lebih besar daripada hasil jika hanya lembaga itu sendiri yang mengerjakannya.

Sinergitas dibutuhkan dalam melakukan kerjasama baik itu antara individu, kelompok dan lembaga

(Utami, 2017). Terciptanya sinergitas yang baik menghasilkan komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Adanya hasil yang lebih besar merupakan hasil kerjasama yang terjalin dengan baik dan setiap pihak yang melakukan kerjasama dengan hasil persentase kepuasan yang besar antara pihak-pihak yang bersinergi. Sebagai tolak ukur dalam melakukan sinergitas, adanya akuntabelitas, *feedback*, komunikasi dan koordinasi.

Sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang optimal. Sinergitas sering juga disebut dengan "Sinergisme". Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan (Mulyono 2014).

Konsep Koordinasi dan Komunikasi juga dapat digunakan sebagai pendukung teori sinergitas (Adriansyah, 2017). Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien (Stoner dan Freeman, 1992). Selain koordinasi, komunikasi merupakan aspek penting dalam mewujudkan sinergitas. Komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu: 1). Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber: komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan; dan 2). Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana

seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

2. Ancaman Nasional

Upaya pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman baik yang bersifat aktual dan potensial. Setiap bentuk ancaman memiliki karakteristik serta tingkat resiko berbeda yang mempengaruhi pola penanganannya, sehingga perlu dicermati hal-hal yang berhubungan dengan penilaian, penggolongan, sasaran dan eskalasi ancaman. Ancaman dapat digolongkan berdasarkan jenisnya; militer dan nonmiliter, berdasarkan sumbernya; luar negeri dan dalam negeri, serta aktornya; negara dan non-negara. Indonesia dengan sumber daya alamnya, keragaman budaya, suku, agama, ras, dan golongan merupakan potensi kekuatan sekaligus ancaman bagi Indonesia dalam menjaga keamanan negara (Witjaksono, 2016). Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa (Indrawan, 2015). Sehingga penguatan pertahanan nirmiliter merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan.

Ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Ancaman non-militer sangat berdimensi sosial budaya karena sifatnya yang internal, atau muncul dari dalam negara. Ancaman jenis ini berdimensi sosial budaya karena didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan,

keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu ini sangat terkait dengan masalah-masalah sosial budaya (Indrawan, 2015).

Pemetaan ancaman non militer dapat dilakukan dengan melalui dua metode, yaitu (1) berdasarkan ancaman (*threatbased assessment*), atau analisa mengenaikalkulasi ancaman yang dihadapi; dan (2) berdasarkan kapabilitas (*capability basedassessment*), atau analisa mengenai kalkukasi kemampuan untuk bisa melakukan suatu tindakan militer.

Lembaga Katanahan Nasional (Lemhanas) RI menyatakan bahwa *proxy war* di Indonesia memiliki beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Gerakan separatis. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum.
- b. Demonstrasi massa. Demonstrasi massa yang berlangsung selama ini tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan yang jelas. Bahkan sering ditemui demonstran yang tidak tahu apa yang akan diperjuangkan dalam demonstrasi itu.
- c. Penerapan regulasi yang merugikan. Sebagai contoh adalah peraturan regulasi produk perjanjian internasional yang diterbitkan atas prakarsa *World Health Organization* (WHO) dan Amerika Serikat, yaitu *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC).
- d. Peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan dengan *proxy war*, dengan tujuan untuk merusak generasi muda Indonesia sehingga bangsa Indonesia di masa depan

tidak memiliki generasi yang berkualitas tinggi.

- e. Bentrok antar kelompok. Perkelahian dan aksi anarkis antar pelajar SD, SMP dan SMA dan bahkan mahasiswa, menunjukkan di bidang pendidikan dan generasi muda, tidak terlepas dari aksi *proxy war* itu sendiri.
- f. Makanan dan Obat-Obatan Palsu. Maraknya peredaran makanan yang dibubuhi zat-zat berbahaya bagi kesehatan, peredaran obat-obatan palsu hingga kejadian vaksin palsu baru baru ini, merupakan bagian dari *proxy war* dalam upaya melemahkan ketahanan bangsa dari dalam.
- g. Illegal logging dan illegal fishing. Pembalakan liar dan pencurian kekayaan alam kita dilaut, merupakan upaya *proxy war* untuk menghancurkan kekayaan alam kita melalui bencana alam.
- h. Seks bebas dan LGBT. Generasi muda disusupi dengan gaya hidup hedonisme dan pergaulan seks bebas dan sesama jenis merupakan upaya *proxy war* untuk menghancurkan moral generasi muda Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh. Penelitian ini membahas ancaman non militer yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh akibat belum optimalnya sinergitas pembangunan. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan seluruh ancaman non militer yaitu ancaman politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini juga melakukan pengolahan ulang data sekunder yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik, TNI, POLRI, dan BNP Aceh serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk memperkuat temuan.

Penyusunan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan mengolah informasi hasil *indepth interview* narasumber kunci baik praktisi maupun akademisi. Penyusunan rekomendasi kebijakan juga mempertimbangan penelitian-penelitian terdahulu yang khusus membahas ancaman dan strategi pembangunan Aceh.

Penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh. Beberapa narasumber yang diwawancarai sebagai berikut:

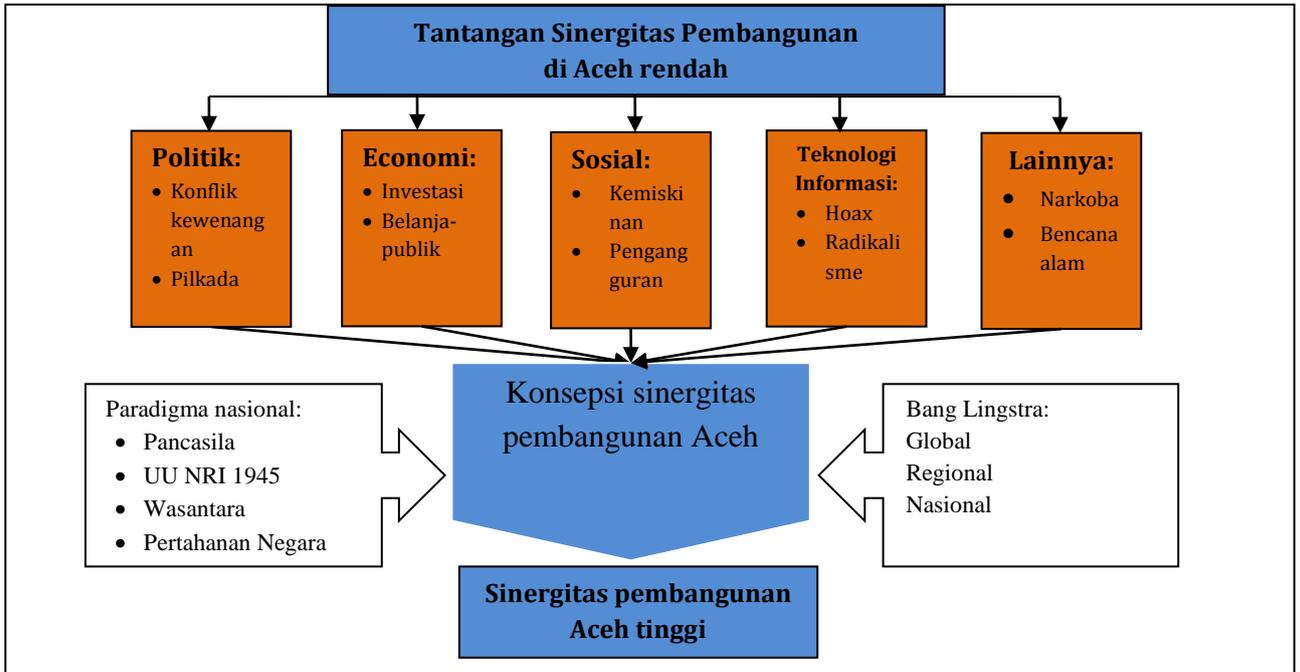
- a. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Aceh
- b. Sekretaris daerah Aceh
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
- d. Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan IV LAN
- e. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh
- f. Badan Investasi dan Promosi Aceh
- g. Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Dinas Sosial Aceh
- h. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh

Kerangka Pemikiran

Beberapa indikator makro ekonomi, sosial, dan politik di Aceh menunjukkan masih adanya permasalahan pembangunan.

Kemiskinan yang masih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera menunjukkan pembangunan Aceh belum mampu memaksimalkan desentralisasi fiskal yang diberikan. Beberapa konflik sosial dan politik

menunjukkan masih lemahnya koordinasi lintas aktor dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh. Kondisi tersebut dapat meningkatkan ancaman pembangunan di Aceh.



Gambar 1. Kerangka Pikir Sinergitas Pembangunan di Aceh

Aceh masih menghadapi ancaman ideologi yang salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan literasi informasi. Pada sektor politik, dinamika politik Aceh sangat tinggi dan tidak dapat dipisahkan dari konflik keamanan yang berkepanjangan sebelum adanya MoU Helsinki (2005). Dari segi ekonomi, rendahnya investasi mengindikasikan beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi Aceh seperti jaminan keamanan dan prosedur investasi. Selain itu, ancaman narkoba juga terus meningkat dengan adanya upaya-upaya menjadikan Aceh sebagai jalur masuk peredaran narkoba internasional.

Beberapa ancaman di atas hanya bisa diatasi dengan melakukan pemetaan permasalahan. Kelemahan-kelemahan hasil pemetaan harus ditindaklanjuti dengan penguatan koordinasi lintas satker sehingga daya tangkal terhadap ancaman pembangunan meningkat.

D. PEMBAHASAN

1. Tantang Sinergitas Pembangunan di Aceh

Pembangunan Aceh yang terus berjalan tidak terlepas dari ancaman pembangunan yang terus berkembang dan bertransformasi. Walaupun kondisi Aceh sudah sangat aman jika

dibandingkan sebelum perdamaian terjadi di tahun 2005, beberapa kasus kekerasan atau pelanggaran tetap ada. Beberapa konflik masih sering dijumpai khususnya di kabupaten/kota yang

jauh dari pusat pemerintahan provinsi. Adapun konflik yang terjadi selama tahun 2016 di Aceh dapat diperhatikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Konflik di Aceh Tahun 2016

Daerah	SARA		Kriminal				Sengketa Lahan	Pengawasan Orang Asing	Kebijakan	Politik	Sumberdaya	Bentrok Massa	Tajpal Batas	Industrial	Bendera Bulan Bintang
	Agama	Intoleransi	Penggunaan Senjata Api Ilegal	Kontak Senjata	Granat/molotov/Bom Rakitan	Pembajakan									
Banda Aceh			1		1		1	16	16		1				
Sabang								1	1						
Aceh Besar					1			1	1	1				2	
Pidie			1				2	1	8	1					
Pidie Jaya						1		2	3						
Bireuen	1		1		1		1	1	2	2					
Aceh Utara						1	1	2	7	1	1		4	2	
Lhokseumawe			2		1			2	3				3		
Aceh Timur					1	2		4	9	2			2	4	
Langsa							1	1	2	2			1		
Aceh Tamiang							4	2		4			3		
Bener Meriah					2	1	1	2	2	1					
Aceh Tengah							1		3		1				
Gayo Lues															
Aceh Tenggara							2			2					
Aceh Jaya			1	1			1			4					1
Aceh Barat							3	1	2	1				5	
Nagan Raya		1	1				1		1	5	1			1	
Simeulue										1	1				
Aceh Barat Daya									1	4					
Aceh Selatan							2			1					
Aceh Singkil							3		1	1	3	1	1		
Subulussalam		1					1		1	1					
Jumlah	1	2	7	1	7	5	25	2	44	73	20	3	1	21	7

Sumber: Kesbangpolinmas Aceh, 2017

Konflik politik dan kebijakan mendominasi kasus yang terjadi di Aceh selama tahun 2016. Adanya perbedaan pandangan politik belum dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan pendidikan politik masyarakat yang relatif rendah khususnya di daerah pedesaan. Adanya partai lokal belum sepenuhnya mampu mengurangi konflik politik. Akibatnya, tujuan pembangunan Aceh yaitu menciptakan Aceh yang sejahtera dan aman akan relatif sulit dicapai.

Konflik-konflik yang terus terjadi di Aceh merupakan bentuk ancaman non militer yang dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan di Aceh. Oleh sebab itu, pemetaan permasalahan menjadi suatu kebutuhan dalam agenda menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh dalam bingkai menjaga NKRI.

Dimensi Politik

Konflik politik Aceh tidak terlepas dari sejarah konflik keamanan Aceh. MoU Helsinki sebagai kesepakatan untuk menghentikan konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM tidak

dapat dijadikan jaminan perdamaian dan keamanan hakiki di Aceh. Untuk tataran makro, konflik memang sudah berakhir. Akan tetapi, selesainya konflik bukan berarti berakhirnya konflik, justru setelah lebih 10 tahun sejak kesepakatan damai ditandatangani, pola konflik di Aceh berubah. Jika dulu konflik yang terjadi bersifat vertikal (antara GAM dengan Pemerintah Indonesia), sekarang yang justru terjadi adalah konflik horizontal. Konflik ini terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan belum sesuai dengan kebutuhan rakyat Aceh (waspada.co.id).

Partai lokal telah menjadi media penyampaian tujuan politik yang sah dari mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Suara rakyat Aceh terkonsentrasi di beberapa partai lokal. Walaupun begitu, konflik yang berbentuk intimidasi dan perusakan masih sering terjadi. Hal tersebut disebabkan kesiapan di akar rumput dalam menghadapi transformasi dari perjuangan bersenjata ke pergerakan politik. Di beberapa daerah yang dulunya merupakan daerah rawan, terjadi beberapa kekerasan politik seperti ancaman pembunuhan terhadap kandidat tertentu, perusakan kantor partai, dan perusakan alat-alat kampanye. Kasus tersebut meningkat tajam khususnya pada saat menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif.

Permasalahan politik lain yang muncul adalah konflik kewenangan Aceh dengan pemerintah pusat. Dua belas tahun sejak naskah perjanjian damai ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, banyak butir kesepakatan yang belum dilaksanakan, salah satunya tentang bendera daerah (<http://www.kba.one>).

Keberadaan bendera bulan sabit dan bintang, sebagaimana disahkan melalui Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013, dapat dilihat sebagai simbol yang identik dengan perlawanan terhadap dominasi pemerintah pusat terhadap daerah, dalam hal ini Aceh. Bahkan dari sisi historis, pada saat konflik di Aceh masih berlangsung, bendera bulan sabit dan bintang ini telah menjadi simbol dari cita-cita untuk memerdekakan diri dari NKRI (wijaya dkk, 2016). Adanya pengibaran bendera tersebut dikhawatirkan akan memperkeruh suasana perdamaian yang telah dibangun dalam bingkai NKRI.

Dimensi Ekonomi

Perekonomian Aceh masih terus berjuang menghadapi beberapa kendala yang sebenarnya bukan hal baru di Aceh. Investasi masih berjalan sangat lambat baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Beberapa penyebab rendahnya investasi Aceh sebagai berikut:

1. Keamanan. Beberapa investor baik dalam maupun luar negeri masih meragukan keamanan Aceh. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Aceh yang merupakan daerah konflik yang berkepanjangan. Walaupun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengubah *image* tersebut, hasil yang diharapkan belum maksimal.
2. Kutipan Ilegal. Adanya kekhawatiran dengan tingginya kutipan ilegal atau yang dikenal dengan "*illegal tax*" menyurutkan banyak calon investor ke Aceh. Tidak hanya calon investor, kutipan seperti ini juga dirasakan sangat berat oleh pengusaha yang telah menjalankan bisnisnya di

Aceh. Akibatnya, terjadi peningkatan biaya produksi yang dapat menutup atau menghentikan aktivitas bisnisnya di Aceh.

3. Prosedur. Prosedur yang sulit dalam berinvestasi di Aceh juga masih menjadi kendaladan hambatan. Reformasi birokrasi belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kepastian hukum, standarisasi pelayanan, dan waktu pelayanan.

Kepastian keamanan di Aceh juga sering terganggu oleh sekelompok orang yang menginginkan perlakuan khusus dengan mengkaitkan kondisi mereka pada masa konflik. Adanya pembenaran malakukan pengutipan/ pemerasan oleh oknum yang mengaku mantan pejuang menyebar ketakutan oleh sebagian pengusaha maupun kepala instansi pemerintah di Aceh. Hal senada ditegaskan oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Aceh bahwa tidak boleh ada pembenaran tindak kriminal dengan dalih kondisi ekonomi oleh kelompok orang yang mengaku sebagai pejuang masa konflik. Selanjutnya Kapolda juga menegaskan tidak boleh ada penggunaan kata pejuang selain pejuang kemerdekaan karena dapat memunculkan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum.

Selain permasalahan investasi, perekonomian Aceh juga menghadapi permasalahan terkait belanja publik. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sering menjadi polemik tahunan yang mengganggu penyediaan barang publik dan pergerakan ekonomi Aceh. Ketergantungan ekonomi Aceh terhadap

APBA masih sangat tinggi sehingga masalah APBA dapat mengganggu laju ekonomi di Aceh. Keterlambatan pengesahan APBA bukanlah hal yang baru terjadi, sejak 2004 fenomena ini telah ada. Pihak legislatif maupun eksekutif sepertinya kurang serius dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang disiplin waktu. Padahal, keterlambatan pengesahan APBA merupakan suatu pelanggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Setiap daerah diharapkan telah mengesahkan APBD satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pada 2017, APBA mengalami keterlambatan yaitu baru disahkan pada 30 Januari 2017. Pengesahan yang terlambat juga terjadi pada tahun 2007 yaitu APBA baru disahkan pada akhir Juni 2007. Sedangkan pada tahun 2004, pengesahan APBA dapat dilakukan pada bulan April 2004. Akibatnya, Pemerintah Aceh belum bisa melakukan *action plan* pembangunan sejumlah proyek dan program pembangunan selama setahun anggaran (www.pikiranmerdeka.co).

Keterlambatan pengesahan APBA disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Proses transaksional atau tawar-menawar yang tak kunjung selesai antara eksekutif dan legislatif (<http://aceh.tribunnews.com>).
2. Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 berjalan lamban di DPRD (<http://aceh.tribunnews.com>).
3. Trik atau akal-akalan oknum anggota DPR Aceh untuk kepentingan tertentu (portalsatu.com).

Selain permasalahan keterlambatan pengesahan, serapan APBA juga cenderung relatif lambat. Pada tahun 2017, hingga pertengahan Agustus, realisasi APBA baru hanya sebesar 40 persen (<http://www.bappeda.acehprov.go.id>). Penyerapan tersebut relatif sangat rendah mengingat sisa waktu yang tersedia hanya sekitar empat bulan lagi. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan manfaat APBA terhadap kesejahteraan rakyat jika keterlambatan ini terus berulang. Selain itu, keterlambatan penyerapan APBA juga dapat berdampak terhadap kualitas pengadaan barang publik akibat penyelesaian yang diburu waktu dengan potensi pengurangan kualitas dan akuntabilitas pekerjaan.

Keterlambatan realisasi anggaran di SKPA juga tidak terlepas dengan adanya rotasi kepemimpinan di semua level jabatan di SKPA. Stabilitas jabatan cenderung rendah sehingga dapat mempengaruhi semangat dan keberanian dalam melakukan kegiatan dan pembiayaan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara bahwa stabilitas jabatan sangat mempengaruhi pencairan anggaran di pemerintah Aceh. Seringnya pergantian kepemimpinan di SKPA menurunkan motivasi kerja SKPA sehingga realisasi fisik dan keuangan di Aceh terlambat.

Dimensi Sosial Budaya

Permasalahan sosial di Aceh yang menjadi sorotan publik adalah kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin di Aceh masih sangat tinggi walaupun persentasenya cenderung menurun. Penduduk miskin

di Aceh pada tahun 2012 sebesar 21,97 persen menjadi 19,44 persen pada tahun 2015 atau menurun sebesar 2,53 persen (rata-rata penurunan hanya sebesar 0,84 persen). Penduduk miskin Aceh dekonsentrasi di pedesaan yaitu sebesar 19,46 persen (2012) dan 17,08 persen (2015). Sementara, penduduk miskin di perkotaan hanya sebesar 13,07 persen (2012) dan 11,13 persen di perkotaan (Bappeda Aceh, 2016).

Kondisi kemiskinan Aceh sangat memprihatinkan karena menjadi masalah yang belum mampu diselesaikan dalam pembangunan 2012-2017. Kondisi ini ditegaskan oleh Sekretaris Bappeda Aceh bahwa:

“Ada 10 isu yang menjadi prioritas pembangunan 2018 di Aceh. Pertama kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah krusial di Aceh. Bahkan Aceh termiskin nomor satu di Sumatera. Hal tersebut tentunya bukan kondisi yang kita inginkan”

Tingginya angka kemiskinan di Aceh menunjukkan kelemahan Pemerintah Aceh dalam membangun program-program pengentasan kemiskinan. Besarnya anggaran pemerintah yang tertuang di APBA belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebijakan-kebijakan yang langsung mengurai simpul kemiskinan, khususnya kemiskinan di pedesaan. Kinerja BAPPEDA menjadi sorotan publik karena merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Aceh. BAPPEDA menjadi saringan akhir dalam penentuan semua kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Selain itu, tingginya kemiskinan di Aceh disebabkan ketidakmampuan pengelolaan sumber daya desa. Adanya

transfer fiskal yang cukup besar sejak tahun 2015 ke pemerintah desa seharusnya mampu menyelesaikan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan di desa. Kesiapan aparatur desa (gampong) menjadi modal awal suksesnya pemanfaatan dana desa dalam mengangkat kemandirian desa. Pengelolaan yang efektif akan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti peningkatan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan yang merupakan rencana pembangunan nasional.

Permasalahan lain yaitu masih mengganggu pembangunan Aceh adalah tingginya angka pengangguran di Aceh. Angka pengangguran cenderung berfluktuasi, namun angka pengangguran sebesar 9,93 pada tahun 2015 tergolong tinggi. Selanjutnya, jumlah penduduk yang menganggur cenderung meningkat dari 179.944 jiwa (2012) menjadi 217.806 jiwa (2015) (Bappeda Aceh, 2016). Hubungan pengangguran dan investasi sangat kuat. Investasi yang rendah mendorong rendahnya serapan tenaga kerja di Aceh. Pertumbuhan jumlah lulusan sekolah dan universitas yang tinggi tidak dapat diikuti pertumbuhan lapangan kerja. Akibatnya, angka pengangguran meningkat tajam di Aceh.

Dimensi Keselamatan Umum

Dua permasalahan yang dapat mengganggu keselamatan umum di Aceh yaitu narkoba dan bencana alam. Provinsi Aceh tidak lagi hanya dikenal sebagai produsen ganja tetapi sebagai pusat transit narkoba internasional. BNN Aceh menyatakan bahwa beberapa pelabuhan tikus diyakini menjadi titik masuk peredaran narkoba di Aceh. Luasnya garis pantai di Aceh dan

pengawasan yang kurang menjadikan Aceh sebagai wilayah transit narkotika internasional di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM untuk pengungkapan kasus narkoba di wilayah Aceh.

Selain itu, pengungkapan kasus narkoba di Aceh menjadi sulit karena respon dan dukungan masyarakat masih minim. Adanya keengganan dalam melaporkan kegiatan narkoba mempersulit BNN dan POLRI mengungkap kasus narkoba di Aceh. Pelaporan masyarakat terhadap aktivitas penanaman ganja atau penyulundupan sabu dan ekstasi di Aceh masih sangat minim. Selain itu, kesediaan keluarga pecandu narkoba untuk melaporkan pengguna narkoba di kalangan keluarganya masih sangat sedikit karena kekhawatiran terhadap proses hukum yang akan dihadapi.

Selain narkoba, bencana alam menjadi ancaman keselamatan umum yang menjadi fokus pembangunan Pemerintah Aceh. Berada pada wilayah cincin api, Aceh memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi seperti gempa dan tsunami. Pada tahun 2004, Aceh mengalami gempa dan tsunami terbesar yang menyebabkan lebih dari 200 ribu korban jiwa meninggal dan ratusan ribu lainnya hilang. Sedangkan gempa yang terbaru terjadi di Pidie Jaya (2016) dengan jumlah korban jiwa lebih dari 100 jiwa. Tingginya angka kematian akibat bencana disebabkan masih rendahnya ketahanan bencana masyarakat Aceh. Upaya sosialisasi masih relatif kurang dan cenderung intensif pada periode tertentu saja.

Dimensi Teknologi Informasi

Perkembangan informasi dan teknologi menjadi modal sekaligus juga ancaman pembangunan. Permasalahan informasi dan teknologi di Aceh relatif sama dengan yang dihadapi provinsi lain ataunasional. Salah satu masalah yang sering muncul adalah penyebaran berita palsu atau *hoax* yang bertujuan mengganggu keamanan dan kerukunan beragama. Selain itu, *hoax* juga sering tujuan untuk memfitnah kinerja pemerintah dengan tujuan menurunkan kepercayaan dan dukungan publik. Hal tersebut biasanya diikuti dengan penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila atau ajakan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan umum.

Pernyataan senada juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh:

Banyak berita *hoax* dan menyebar luas karena hitungan detik informasi dengan mudah tersebar bahkan hingga ke pelosok desa di Aceh. Sebaran ini (*hoax*) tidak bisa kita bendung.

Perkembangan akses informasi melalui *website* atau aplikasi *online* menjadi pintu masuk penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan NKRI. Deradikalisasi melalui dunia maya juga dirasakan oleh netizen di Aceh. Berita terkait liberalisme, atheisme, ekstrimisme, dan lain sebagainya dapat dengan mudah di akses oleh publik Aceh. Ajakan untuk mendirikan negara dengan landasan agama tertentu juga ditemukan di Aceh. Penyebaran paham-paham tersebut biasanya menasar kaum muda yang masih mencari jati diri

dan menginginkan perubahan yang cepat.

Dimensi Legislasi

Aceh merupakan salah satu provinsi yang menyanggah status daerah otonomi khusus di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bertindak sebagai lembaga legislatif di Aceh dengan fungsi merumuskan kebijakan (legislasi) Aceh. Permasalahan yang sering dijumpai adalah produktivitas yang rendah. UU No. 11/2006 sudah berjalan 10 tahun sejak dijadikan instrumen baru kebijakan otonomi khusus Aceh pada agustus 2006. Akan tetapi, tercatat masih ada 4 Peraturan pemerintah dan sekitar 23 qanun Aceh yang belum dibentuk dari total 64 qanun Aceh. Hal ini tentu saja akan menghambat pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Aceh dengan sempurna (Herizal dan Purwaningsih, 2017).

Salah satu permasalahan legislasi adalah perihal bendera Aceh. Konflik bendera ini menjadi isu hangat dalam praktik ketatanegaraan dan politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alasan antara lain: pertama, gambar dan komposisi bentuk serta warna yang digunakan sebagai bendera Aceh faktanya sama dengan bendera GAM yang dianggap oleh Pemerintah Indonesia sebagai gerakan separatis. Bendera Aceh, begitu pun bendera GAM, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: warna dasar merah, garis horizontal putih, garis horizontal hitam, bulan sabit, dan bintang (Widjaya dkk, 2016).

Pengibaran bendera Aceh di beberapa kabupaten dikhawatirkan akan

menciptakan konflik baru. Padahal, Pemerintah pusat belum mengizinkan pengibaran bendera Aceh karena Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat belum ada kesepakatan mengubah atau tidak mengklarifikasi qanun (peraturan daerah) tentang bendera dan lambang Aceh. Oleh sebab itu, tindakan pengibaran harus dapat dicegah karena konflik qanun bendera belum selesai.

b. Permasalahan Sinergitas Pembangunan di Aceh

Selain permasalahan di atas, Pemerintah Aceh juga masih menghadapi permasalahan terkait pencapaian visi dan misi pembangunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan belum tercapai sepenuhnya akibat dari perencanaan yang terlalu optimis, kondisi kekinian yang berubah, pelaksanaan program dan kegiatan yang belum optimal akibat dari kurangnya komitmen dalam membangun dan terbatasnya pendanaan (Bappeda Aceh, 2016).

Pemerintah Aceh juga menilai, kualitas pembangunan di provinsi Aceh tidak terlepas dari kualitas pembangunan di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai jika adanya sinergitas pembangunan antar wilayah yang dirasakan masih kurang. Dalam konteks kekinian, membangun Aceh tidak hanya memerlukan integrasi program dan kegiatan di semua level pemerintahan namun juga memerlukan kontribusi pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, APBDK dan Swasta.

Sinergitas pembangunan di beberapa aspek masih menjadi tantangan terbesar di Aceh. Oleh sebab itu, BAPPEDA Aceh dalam laporan

Kinerja Pembangunan Aceh telah menekankan pentingnya koordinasi lintas satker SKPA dan juga instansi vertikal. Beberapa kelemahan koordinasi yang telah dipetakan sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan di Aceh menunjukkan masih lemahnya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan Aceh yaitu antar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh dengan bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
2. Permasalahan pendidikan terkait menghadirkan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing mengindikasikan masih relatif lemahnya koordinasi pembangunan pendidikan di Aceh. Lulusan Aceh dinilai belum memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar tenaga kerja daerah dan nasional.
3. Permasalahan pembangunan infrastruktur Aceh seperti pembangunan irigasi dan jalan menunjukkan masih lemahnya koordinasi Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Kondisi irigasi yang banyak rusak berat memerlukan koordinasi pembangunan dan perawatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Aceh.

Selain ketiga permasalahan koordinasi di atas, sinergitas penanganan bencana alam di Aceh juga dinilai masih lemah. Penanganan belum maksimal karena lemahnya manajemen bencana. Koordinasi pemerintah daerah masih kurang. TNI, Polri, Pemkab masih terlihat berjalan sendiri-sendiri dan

belum berjalan secara sinergis (www.bencana-kesehatan.net). Selain itu, mobilisasi aset dalam penanganan bencana alam juga masih sangat lambat akibat standar pelayanan yang belum tersusun secara baik dan sinergis.

2. Indikasi Ancaman Pembangunan

Dimensi Politik

Bentuk-bentuk ancaman yang terjadi saat kampanye baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif dan beberapa kejadian yang mengindikasikan masih adanya ancaman politik di Aceh sebagai berikut:

- a. Adanya ancaman terhadap calon kepala daerah di kabupaten/kota yang akan ikut berkompetisi di pilkada. Ancaman yang muncul berupa ancaman kekerasan maupun ancaman pembunuhan.
- b. Perusakan alat peraga kampanye masih tinggi khususnya di daerah-daerah yang tergolong daerah rawan pada saat konflik keamanan sebelum tahun 2005. Pembakaran dan perusakan alat peraga menjadi kasus yang sering terjadi dan diikuti dengan bentrok antar tim sukses kandidat tertentu.
- c. Pengeboman, penggranatan, atau penembakan posko kemenangan kandidat tertentu. Salah satu kejadian yang menjadi perhatian publik adalah penggranatan ke posko pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah pada November 2016. Selain itu, kejadian tersebut mengindikasikan masih adanya kepemilikan senjata ilegal oleh kelompok tertentu yang mungkin merupakan sisa konflik Aceh.
- d. Permasalahan politik di Aceh juga ditunjukkan dengan adanya indikasi kecurangan calon tertentu dengan melakukan politik uang. Adanya pemberian nilai uang tertentu kepada masyarakat guna memilih calon tertentu menimbulkan keresahan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Selain uang, politik uang dilakukan dengan memberikan benda-benda yang merupakan kebutuhan dasar pemilih. Kejadian politik uang semakin tinggi di daerah pedesaan mengingat pemilih yang rentan dalam tindakan ini adalah pemilih di daerah yang jauh dari pengawasan dan masuk ke dalam daerah pedesaan.
- e. Selain itu, masalah politik di Aceh yang langsung berhubungan dengan kualitas pembangunan di Aceh adalah adanya indikasi politik birokrasi. Pada periode Gubernur 2012-2017, telah terjadi sepuluh kali mutasi kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Hal tersebut tentunya merupakan catatan buruk bagi pemerintah Aceh dimana setiap semester, jika dibagi rata, terjadi pergantian kepala SKPA. Ini merupakan mutasi yang sangat tinggi selama Aceh menjadi provinsi mandiri. Tentu gubernur mempunyai alasan melaksanakan mutasi pejabat dalam pemerintahan yang tengah dijalankannya. Akan tetapi, hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh politik di dalam birokrasi di Aceh.

Beberapa kejadian tersebut telah mengganggu dan merusak kualitas demokrasi di Aceh yang bertujuan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan memberi kesempatan semua pihak untuk berkompetisi dunia politik.

Dimensi Ekonomi

Perekonomian Aceh dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi dan belanja publik. Adapun beberapa indikasi yang menunjukkan ancaman pembangunan ekonomi di Aceh sebagai berikut:

- a. Rendahnya investasi dapat diamati dari tingkat dan fluktuasi nilai investasi Aceh baik PMDN maupun PMDA. Agroindustri yang mendukung peningkatan nilai tambah belum berkembang secara baik meskipun promosi dan kemudahan investasi sudah dilakukan. Produk unggulan tersebut masih cenderung dipasarkan dalam bentuk *raw material* ke luar Aceh. Sehingga nilai investasi cenderung masih rendah dan berfluktuasi.
- b. Kemandirian fiskal yang rendah akibat PAD rendah. Ketergantungan Aceh terhadap dana pusat masih sangat tinggi. Pada tahun 2015, 48 persen porsi pendapatan APBA bersumber dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp 16,92 triliun, hanya 10 persen berasal dari PAD (aceh.tribunnews.com).
- c. Realisasi APBA belum menyentuh angka 50 persen di triwulan ketiga mengindikasinya lambatnya pengeluaran belanja publik. Paket-paket pengadaan, khususnya infrastruktur, baru

selesai pada penetapan pemenang sehingga sudah dapat dipastikan akan terlambatnya pencairan APBA Aceh. Permasalahan pengadaan mendorong Gubernur Aceh melakukan klarifikasi kebijakan melalui media sosial FB sebagai penyampaian informasi ke publik terkait adanya indikasi permainan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh.

- d. Permasalahan ekonomi Aceh juga dapat diamati dari indikator makro lainnya yaitu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan yang terkonsentrasi di desa menunjukkan bukti pembangunan yang belum merata hingga ke pedesaan. Selain itu, serapan tenaga kerja yang rendah menunjukkan perekonomian yang tidak padat karya.

Dimensi Sosial Budaya

Permasalahan kemiskinan di Aceh dapat dilihat dari kondisi kemiskinan dan pengangguran. Adapun indikasi tersebut sebagai berikut:

- a. Kondisi kemiskinan dan pengangguran secara nasional Aceh berada di peringkat ke-6 termiskin setelah Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, dan Gorontalo. Padahal sebelumnya, Aceh masih berada pada posisi nomor 2 termiskin di Sumatera, dan nomor 7 di Indonesia.
- b. Kemiskinan Aceh diperburuk dengan angka pengangguran yang tinggi sehingga kemungkinan masyarakat keluar dari kemiskinan sangat sulit. Pembukaan lapangan kerja baru

sangat sedikit karena investasi sangat rendah.

- c. Peningkatan pengangguran sarjana telah menjadi masalah sosial baru di Aceh. Tidak adanya kontrol terhadap universitas swasta dalam menghasilkan sarjana berkompentensi tinggi di Aceh menyebabkan *educated unemployment* meningkat. Dikhawatirkan dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap instansi pendidikan dalam menciptakan lulusan sarjana yang dapat diserap oleh dunia kerja.

Dimensi Keselamatan Umum

Peningkatan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh mengindikasikan minimal dua fakta; (1) aktifitas penggunaan dan peredaran narkoba di Aceh meningkat, (2) Upaya Polri dan BNN dalam mengungkap kasus narkoba terus dilakukan. Akan tetapi, terdapat kemungkinan kasus yang terjadi lebih besar dari yang berhasil diungkap. Menurut BNN Aceh, adanya hambatan internal instansi dan masih rendahnya keterbukaan masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam penanganan narkoba di Aceh.

Beberapa indikasi yang menunjukkan eskalasi ancaman narkoba di Aceh sebagai berikut:

- a. Penangkapan yang terjadi pada Agustus 2017 yaitu 40 kg sabu-sabu mengindikasikan adanya jalur peredaran narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui Aceh yaitu perairan laut Aceh melalui Selat Malaka. Pada tahun 2016, kasus narkoba di wilayah Polda Aceh mengalami

peningkatan, dimana pada tahun 2015 terjadi sebanyak 1.170 kasus menjadi 1.441 kasus pada tahun 2016 atau meningkat sebanyak 271 kasus (aceh.tribunnews.com).

- b. Adanya keterlibatan oknum instansi pemerintah dalam peredaran sabu. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan terhadap oknum PNS (sipir) yang bertugas di Pintu Pengamanan Utama (P2U) Rumah Tahanan Bireuen. Sipir tersebut terbukti menjadi pengedar sabu-sabu yang bersumber dari salah satu napi yang merupakan bandar sabudi lingkungan rumah tahanan (www.harianaceh.co.id).
- a. Penggunaan sabu oleh anggota legislatif. Anggota dewan terhormat di Aceh juga tidak terlepas dari ancaman narkoba di Aceh. Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba oleh salah satu anggota DPRA Aceh pada Agustus 2017 mengindikasikan bahwa lembaga legislatif Aceh juga tidak kebal terhadap ancaman narkoba.
- b. Peningkatan peredaran narkoba di Aceh juga dapat diamati dengan meningkatkan jumlah pasien rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Peningkatan jumlah pasien yang sangat signifikan menyebabkan antrian panjang mengingat keterbatasan kapasitas RSJ Aceh.
- c. Narkoba juga telah ditemui dikalangan siswa dan mahasiswa Aceh. Upaya pengedaran yang masif dan proteksi dini yang kurang menyebabkan golongan pelajar menjadi sasaran mudah bandar narkoba.

Keselamatan umum lainnya yang menjadi perhatian adalah bencana alam. Masih tingginya korban jiwa dari setiap bencana alam mengindikasikan rendahnya ketahanan masyarakat Aceh terhadap bencana, khususnya bencana yang masuk dalam kategori *unpredictable disaster* seperti gempa dan tsunami.

Dimensi Teknologi Informasi

Indikasi permasalahan teknologi dan informasi di Aceh dapat dilihat dari meningkatkan jumlah penyebaran berita hoax terkait kondisi nasional maupun internasional. Ancaman teknologi informasi di level nasional juga merupakan ancaman informasi di Aceh karena keunikan jangkauan ancaman informasi berbeda dengan ancaman lainnya yaitu tidak terbatas oleh wilayah (Kemhan, 2017). Informasi tidak memiliki batasan ruang sehingga penyebaran informasi *hoax* di nasional dapat menjadi konsumsi masyarakat di Aceh.

Adapun beberapa indikasi ancaman perkembangan teknologi informasi di Aceh sebagai berikut:

- a. Akses internet terhadap konten-konten yang mengarah radikalisme masih dapat diakses oleh masyarakat Aceh. Walaupun pemerintah telah menutup ribuan situs yang dapat mengancam keutuhan NKRI, masih banyak *website* yang menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
- b. Terjadi peningkatan sebaran berita *hoax* dikalangan masyarakat Aceh yang terkait dengan kinerja pemerintah, konflik Timur Tengah, dan

konflik-konflik negara tertentu seperti Konflik Rohingnya yang dapat menciptakan kebencian pada etnis dan agama tertentu di Aceh.

- c. Isu keamanan informasi juga sempat menyerang pengguna komputer berbasis online di tahun 2017. *Ransomware*, salah satu jenis *malware*, telah menyebar ketakutan di kalangan pengguna internet di Aceh, baik di pemerintahan, swasta, maupun pelajar serta masyarakat umum. Walaupun tidak ada laporan penyerangan di pemerintahan, terdapat beberapa perusahaan dan individu yang menjadi korban serangan *ransomware* pada tahun 2017.

Kedewasaan masyarakat umum dalam memanfaatkan akses internet dapat dilihat dari masih adanya penyebaran informasi yang belum tentu benar sehingga menyebabkan kekeliruan dalam memahami sebuah masalah. Di media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *whatsapp*, terjadi peningkatan penyebaran informasi yang dapat mengganggu ketertiban dan kerukunan bermasyarakat.

Dimensi Legislasi

Permasalahan legislasi di Aceh dapat dibagi dalam dua pengamatan yaitu produktivitas dan ketepatan waktu. Pemetaan terhadap legislasi di Aceh telah dipetakan secara komprehensif oleh Herizal dan Titin (2017). Adapun temuan mereka terkait indikasi rendahnya produktivitas dan ketepatan waktu legislasi di Aceh sebagai berikut:

- a. Produktivitas rendah; dari tahun 2006-2016, produktivitas DPRA selalu rendah jika dilihat dari jumlah qanun Aceh yang dihasilkan. DPRA selalu gagal setiap tahunnya untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam program legislasi Aceh (prolega). Dari target prolega tahun 2006-2016 sebanyak 193 rancangan qanun (raqan) hanya dapat diselesaikan sebanyak 104 qanun Aceh. Dari jumlah itu, sebanyak 70 qanun Aceh berjenis nonkumulatif terbuka dan sebanyak 34 qanun berjenis qanun kumulatif terbuka.
- b. Ketepatan waktu; dalam sepuluh tahun terakhir, DPRA tidak pernah tepat waktu menetapkan prolega prioritas sebagaimana ditentukan peraturanperundang-undangan. Prolega prioritas paling lama harus ditetapkan sebelum pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) atau sebulan sebelum tahun berjalan. Begitu juga dengan ketepatan waktu membahas dan mensahkan qanun Aceh. DPRA sering melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam prolega prioritas, RKT, dan keputusan lainnya sehingga target legislasi DPRA tidak pernah tercapai
- c. Selain dua kondisi di atas, implikasi qanun juga menjadi perhatian masyarakat Aceh. Salah satunya adalah qanun bendera yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara Pemerintah Aceh dengan

Pemerintah Pusat. Keberadaan bendera bulan sabit dan bintang, sebagaimana disahkan melalui Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013, dapat dilihat sebagai simbol yang identik dengan perlawanan terhadap dominasi pemerintah pusat terhadap daerah, dalam hal ini Aceh. Bahkan dari sisi historis, pada saat konflik di Aceh masih berlangsung, bendera bulan sabit dan bintang ini telah menjadi simbol dari cita-cita untuk memerdekakan diri dari NKRI.

E. KESIMPULAN

Pembangunan di Aceh masih terus menghadapi perubahan ancaman pembangunan. Intimidasi dalam pemilihan langsung masih ditemui. Kemiskinan juga tinggi jika dibandingkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Investasi, baik dalam maupun luar, masih relatif rendah. Selain itu, tantangan narkoba di Aceh semakin tinggi dengan tingginya peredaran sabu-sabu di Aceh. Ancaman teknologi informasi juga tidak dapat dikesampingkan mengingat akses informasi semakin cepat dan pembangunan kesadaran internet sehat masih relatif rendah.

Adapun rekomendasi penelitian terkait strategi penurunan ancaman non militer di Aceh sebagai berikut:

- a. Untuk mereduksi ancaman politik, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta instansi terkait lainnya harus meningkatkan upaya edukasi politik melalui kegiatan-kegiatan lokakarya, simposium, maupun seminar. Edukasi politik juga tidak hanya

- diarahkan ke masyarakat umum tetapi juga calon kepala daerah dan legislatif sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki wawasan dan kesadaran berpolitik yang tinggi.
- b. Untuk mengurangi ancaman ekonomi terkait investasi maka Pemerintah Aceh harus menggiatkan kegiatan-kegiatan promosi dan sosialisasi keamanan Aceh seperti mengadakan even-even nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat diikuti dengan deklarasi lintas sektor terhadap jaminan keamanan investasi di Aceh. Selain itu, Pemerintah Aceh harus meningkatkan kepastian hukum dan prosedur dalam setiap rencana dan realisasi investasi di Aceh.
 - c. Untuk mengurangi ancaman sosial terkait kemiskinan dan pengangguran maka perencanaan dan pengawasan program dan dana desa harus ditingkatkan. Program yang disusun harus disinkronkan dengan program kabupaten, sehingga pembangunan desa dan program kemiskinan dapat berjalan beriringan. Pengembangan produk lokal di setiap desa juga dapat menjadi model alternatif kemandirian desa dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
 - d. Untuk mengurangi ancaman dari perkembangan teknologi informasi maka Pemerintah Aceh harus meningkatkan upaya literasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi baik tatap muka maupun via media online terkait internet sehat. Selain itu, penguatan peran keluarga juga harus disosialisasikan agar pengawasan dapat dilakukan dan dimulai dari keluarga.
 - e. Untuk mengurangi ancaman narkoba maka perlu adanya pola koordinasi yang lebih efektif dan efisien antar POLDA Aceh dan BNNP Aceh dalam penanganan kasus narkoba di Aceh. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM harus disikapi dengan adanya kerjasama yang lebih fleksibel guna mobilisasi sumber daya yang ada. Selain itu, Pemerintah Aceh perlu memasukkan agenda penanganan narkoba sebagai agenda prioritas pembangunan dengan memasukkan isu narkoba ke dalam RPJM 2018-2022.
 - f. Untuk mengurangi ancaman legislasi maka DPRA harus meningkatkan produktivitasnya serta ketepatan waktu terkait pembahasan qanun-qanun yang belum diselesaikan. Penyusunan qanun juga harus dilandaskan kepentingan bersama, bukan sekelompok golongan tertentu yang selama ini masih dirasakan oleh masyarakat dan akademisi. Qanun-qanun yang dihasilkan harus mengedepankan semangat pembangunan dalam bingkai NKRI.

F. PERNYATAAN

Penelitian ini dilakukan atas pembiayaan Kantor Pelaksana Tugas Pokok (PTP) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Perwakilan Aceh. Tim penulis merupakan tim peneliti dalam

kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PTP Kemhan RI Perwakilan Aceh.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, H., J. 2017. Sinergitas Kodim 0402/Oki Dengan Pemda Ogan Komering Ilir Dalam Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dan Kabut Asap Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Tahun 2015. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*. Volume 3 Nomor 3
- Affan, H.2015. Sepuluh tahun perdamaian Aceh: Kesaksian empat eks kombatan GAM. Diakses melalui www.bbc.com/indonesia/ pada tanggal 5 Juni 2017
- Bakrie, C. R. 2007. Pertahanan negara dan postur TNI ideal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 69
- BAPPEDA Aceh, 2016. Kinerja Empat Tahun Pemerintah Aceh, 2013-2016. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Kemhan. 2017. Hasil Rapat Kerja Kantor Perwakilan Aceh Kemenhan. 2017. Banda Aceh.
- Herizal dan Purwaningsih,T. (2017). Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi. *Journal of Governance And Public Policy* Vol. 4 No. 2
- Indrawan, Jerry. 2015. Studi Strategis dan Keamanan. Jakarta: NadiPustaka.
- Mulyono, S. P. 2014 Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca. MMH, Jilid 43 No. 3.
- Sutomo, A. 2016. Naskah Komandan Sesko TNI Pada Seminar Nasional "Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI". Hal.12
- Stoner, J. A, Freeman, R. E (1992). Manajemen. Jakarta: Intermedia
- Utami, T., H.2017. Sinergitas Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Di Desa Datah Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. *Journal Pemerintahan Integratif*, 2017, 5 (4): 497-506
- Witjaksono. 2016. Strategi dalam Upaya Mempertahankan Bangsa dan NKRI. *Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI*. Bandung: UNPAD
- Wijaya, dkk. (2016). Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No. 1 Tahun 2016

Website

- <http://waspada.co.id/artikel-pembaca/aceh-dari-konflik-angkat-senjata-hingga-konflik-politik/>
- <http://www.kba.one/news/nova-bendera-dan-lambang-aceh-tergantung-pemerintah-pusat/index.html>
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/01/18/proyek-siluman-molorkan-apba>. Pernyataan dari Aktivis Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/01/31/apba-2017-ketuk-palu>
- <http://portalsatu.com/read/news/hentikan-akal-akalan-dpr-aceh-mengutak-atik-apba-2017-22949>.

Pernyataan Ketua Forum Bedah
Desa Nasional (FBDN)

<http://aceh.tribunnews.com/2016/04/08/ketergantungan-aceh-terhadap-pusat-tinggi>

<https://www.harianaceh.co.id/2016/12/30/kapolda-aceh-kasus-narkoba-selama-2016-meningkat/>

<http://aceh.tribunnews.com/2017/06/09/sipir-rutan-bireuen-tertangkap-tangan-jual-sabu>